

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta disaat beliau melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, pada Selasa 27 September 2016. Saat berpidato dihadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik.

Tepatnya pada kamis, 6 Oktober 2016 pidato Ahok tersebut viral di media sosial lewat jejaring *Facebook* milik Buni Yani. Video yang di unggah oleh Buni Yani inilah yang membuat sebagian umat Islam di Indonesia tersinggung dan mengecamnya. Lalu pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 7 Oktober 2016, Ahok resmi dilaporkan ke Bareskrim POLRI oleh Habib Novel Chaidir Hasan, yang berprofesi sebagai seorang alim Ulama, dengan Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016, dengan dugaan Penistaan Agama.¹

Setelah menjadi pembicaraan hangat di publik, pada tanggal 10 Oktober 2016, Ahok melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada publik. Ia menyatakan tidak bermaksud membuat umat Islam tersinggung atas pernyataannya tersebut. Namun pernyataannya masih memantik reaksi

¹ Yantina Debora, *Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama*, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>, Diakses tanggal 03 Desember 2018.

kemarahan publik yang tidak terbendung, seiring dengan polemik yang ada MUI mengeluarkan Sikap Keagamaan yang menyatakan bahwa Ahok benar-benar melakukan penodaan Agama dengan mengutip Surat Al-Maidah ayat 51, pernyataan sikap Keagamaan MUI ini disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar Abbas.²

Kemudian muncul berbagai aksi demonstrasi umat Islam yang menamai gerakan mereka dengan nama Aksi Bela Islam, Aksi Bela Islam I dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2016 di depan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi Bela Islam II yang digagas oleh GNPF-MUI dilakukan pada tanggal 4 November 2016 dengan istilah Aksi 411, didalam aksi kali ini yang dihadiri oleh massa yang begitu besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia, diperkirakan mencapai ratusan ribu orang dan banyak Ulama dengan latar belakang ormas yang berbeda, dan berpusat didepan Istana Negara. Massa menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi kasus dugaan Penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok.

Selanjutnya Aksi Bela Islam III juga di gagas oleh GNPF MUI/Ulama dilakukan tanggal 2 Desember 2016 dengan istilah Aksi 212, sama seperti aksi 4 November 2016, aksi kali ini mendatangkan massa yang jauh lebih besar jumlahnya serta berasal dari berbagai daerah, aksi ini berpusat di

² Indah Mutiara, *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51*, <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, Diakses pada tanggal 03 Desember 2018.

Monumen Nasional, dengan kegiatan berdoa dan sholat Jum'at bersama, aksi ini diklaim sebagai aksi damai.

Setelah berhasil menurunkan elektabilitas Ahok lewat berbagai aksi demonstrasi terhadap kasus penodaan Agama yang dilakukan olehnya, serta akhirnya mampu membuat Ahok menuai kekalahan di kontestasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan menjebloskannya ke dalam penjara, nampaknya Partai pengusung Ahok yang merupakan Partai penguasa tidak tinggal diam atas apa yang telah dilakukan oleh GNPF-MUI/Ulama dengan aksi-aksinya.

Berbagai serangan demi serangan dilancarkan untuk menangkap orang-orang yang berperan aktif didalam GNPF-MUI/Ulama, seperti membuat orang-orang yang aktif didalam GNPF-MUI/Ulama terseret dan terjerat berbagai kasus tindakan kriminal seperti kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab. Habib Rizieq Shihab merupakan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI/Ulama pada waktu itu, tidak tanggung-tanggung kasus yang menimpanya adalah berjumlah 9 kasus.

Selain Habib Rizieq Shihab, kasus hukum juga menimpa Ulama-Ulama lain dari GNPF-MUI/Ulama, seperti kasus yang menimpa Ketua Umum GNPF-MUI/Ulama Ust. Bahtiar Natsir yakni kasus pencucian uang, serta juru bicara FPI Munarman yang telah menjadi tersangka dalam kasus pelecehan dan fitnah terhadap Pelancang Bali. Karena adanya berbagai kasus hukum dan diskriminasi hukum serta teror terhadapnya membuat Habib Rizieq Shihab yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GNPF-

MUI/Ulama serta Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), memutuskan untuk pergi dan menetap sementara waktu di Saudi Arabia.

Karena berbagai serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan serta kasus hukum yang menimpa Ulama-ulama didalam GNPF-MUI/Ulama, akhirnya GNPF MUI/Ulama bertransformasi menjadi tidak hanya sebagai gerakan untuk mengawal kasus Penodaan Agama oleh Ahok, tetapi menjadi sebuah gerakan Politik. Bertujuan untuk mengganti Presiden agar ketidakadilan tidak terus tumbuh subur dan berlanjut, yakni lewat jalur yang Legal, Konstitusional, Prosedural dan Demokratis melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Hanya sebuah kebetulan pada Pilpres tahun 2019 cuma terdapat dua pasangan calon yakni Nomor 01 Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dari pihak Petahana dan Nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno sebagai penantang, maka daripada itu GNPF-MUI/Ulama hanya mempunyai satu pilihan mutlak untuk berpihak kepada satu poros yakni berpihak kepada pihak penantang yaitu Nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Hal ini terbukti melalui Ijtima Ulama baik I maupun II yang diadakan oleh GNPF-MUI/Ulama dengan tegas dan konsisten mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres tahun 2019.

Berlabuhnya dukungan dari GNPF-MUI/Ulama yang bisa kita labelkan sebagai gerakan Politik golongan religius kepada seorang Prabowo Subianto sebagai seorang yang nasionalis, bukanlah hal yang direncanakan

secara sistematis dan melalui penjanjian-perjanjian Politik serta demi keuntungan suatu kelompok semata. Sebagaimana fenomena Koalisi Politik di Indonesia sekarang adalah bukan bersifat ideologis melainkan bersifat pragmatis, maksudnya adalah Koalisi-koalisi yang terjalin selama ini hanyalah Koalisi yang bersifat jangka pendek, dan bukan persoalan berbeda ideologi selagi Koalisi tersebut dapat memberikan keuntungan secara cepat tidak peduli walaupun dengan mengkombinasikan antara Partai Islam (Religius) dan Partai Nasionalis.³

Seperti halnya Koalisi-koalisi antara golongan nasionalis-religius yang terjalin selama bergulirnya era reformasi di Indonesia, bahwa didalam setiap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari seorang tokoh yang mewakili dua golongan besar tersebut, kita bisa contohkan bahwa sejak Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pertama di Indonesia yakni pada Pilpres tahun 2004, terdapat 5 (lima) pasangan calon yang dinyatakan lolos dan layak berkompetisi didalam Pilpres tahun 2004, dan didalam kelima pasangan calon tersebut terdapat tokoh-tokoh yang mewakili golongan nasionalis dan religius di Indonesia.

Sebut saja pasangan Nomor 1 (satu) Wiranto-Salahuddin Wahid yang diusung Partai Golongan Karya, kita tahu bersama bahwa Wiranto adalah Mantan Panglima ABRI yang tidak perlu dipertanyakan lagi nasionalismenya. Berpasangan dengan Salahuddin Wahid yang merupakan anak seorang tokoh nasional yang berlatar belakang golongan religius yakni KH. Wahid Hasyim

³ Imam Yudhi Prasetya, (2011), *Jurnal Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*, Vol 1 No 1, h. 39.

dan merupakan adik dari Presiden RI ke 4 (empat) KH. Abdurrahman Wahid, Salahuddin Wahid dikenal sebagai tokoh Politik sekaligus Ulama dari Golongan NU.

Selanjutnya Pasangan Nomor 2 (dua) Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti yang kita ketahui bahwa Megawati adalah Putri dari Proklamator dan Presiden RI ke 1 (satu) Ir. Soekarno yang berasal dari golongan nasionalis, mengikuti jejak ayahnya yang berkarir didunia Politik Megawati juga politisi dari kalangan nasionalis. Berpasangan dengan Hasyim Muzadi, seorang tokoh Islam Indonesia dan mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama.

Pasangan Nomor 3 (tiga) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, Amien Rais adalah aktivis Reformasi sekaligus politisi dari Partai Amanat Nasional, yang merupakan representasi Golongan religius Muhammadiyah. Berpasangan dengan Siswono adalah tokoh nasional dari kalangan pengusaha yang pernah menjabat sebagai Menteri pada masa Orde Baru tepatnya di Kabinet pembangunan V dan VI.

Pasangan Nomor urut 4 (empat) Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, SBY merupakan tokoh nasional dan pendiri Partai Demokrat, berlatar belakang Militer sebagai seorang pensiunan Jendral TNI yang merepresentasikan golongan nasionalis. Berpasangan dengan Jusuf Kalla seorang pengusaha asal makassar, juga merupakan aktivis

organisasi kemahasiswaan HMI, dan dikenal sebagai tokoh yang religius religius.

Pasangan Nomor 5 (lima) Hamzah Haz-Agum Gumelar yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Hamzah Haz merupakan tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-9, juga merupakan ketua umum PPP pada waktu itu, merupakan tokoh nasional dan Politik dari kaum religius. Berpasangan dengan Agum Gumelar yang merupakan tokoh nasional dari kalangan Militer, seorang yang mewakili golongan nasionalis. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat kita lihat bahwa di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena dimana untuk membidik basis massa harus menggabungkan dua unsur golongan tersebut yakni nasionalis dan religius.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, terdapat dua pasangan calon yang juga mengidentikkan dirinya sebagai representasi dari golongan nasionalis dan kaum religius, sebut saja pasangan Nomor 01 Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin yang diusung oleh 9 Partai Politik antara lain: PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI. Joko Widodo adalah Presiden RI ke 7 yang berasal dari PDIP yang merupakan Partai Nasionalis, otomatis Jokowi adalah tokoh yang mewakili golongan nasionalis, berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin yang merupakan *Ra'is Âm* Nahdlatul Ulama juga sebagai Ketua MUI Pusat, maka tidak diragukan lagi ke religiusannya.

Selanjutnya pasangan Nomor 02 Prabowo Subianto-Sandianga Salahudin Uno. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang tokoh

nasional yang mengawali karirnya dibidang Militer, seorang Prabowo muda pada umur 19 tahun memutuskan untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Dua tahun berselang Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, di Kopassus inilah yang melambungkan namanya, puncaknya ia menjadi orang Nomor satu (1) di Kopassus 1996-1998.

Karier Militernya terus meningkat menjadi Panglima Kostrad pada 1998, namun ia tidak bertahan lama berada di Kostrad karena situasi Politik Nasional, maraknya demonstrasi dan lengsernya Presiden Soeharto. Kemudian ia digeser menjadi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI dan menjabat dalam kurun waktu yang cukup pendek dan memutuskan untuk pensiun.

Setelah menghilang dari ruang publik berselang 7 (tujuh) tahun akhirnya dia kembali muncul kepermukaan Pada tahun 2004, dia mencoba bertarung menjadi calon Presiden melalui konvensi Partai Golkar. Belum berhasil di Golkar, dia membangun jaringan tani, ia terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tahun 2004. Pada tanggal 6 Februari 2008 ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), serta pada Pemilu tahun 2009 ia menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai Calon Presiden, namun gagal mengalahkan calon Petahana Susilo Bambang Yudhoyono-Beodiono.

Berikutnya seakan tidak kenal lelah ia kembali mencalonkan diri di Pemilu 2014, kali ini tampil sebagai Calon Presidennya berpasangan dengan Hatta Rajasa yang didukung oleh Koalisi 7 (tujuh) Partai Politik sekaligus ,yang mempunyai 63.54% kursi di DPR, namun sekali lagi beliau gagal menjadi pemenang Pemilu tahun 2014. Meski demikian hal tersebut tidak menyurutkan semangat perjuangan beliau untuk mencoba peruntungan kembali di kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, kali ini beliau berpasangan dengan seorang pengusaha muda yang juga merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, keduanya diusung oleh 4 (empat) Partai Politik (GERINDRA, PKS, PAN, Demokrat).

Prabowo Subianto dikenal banyak orang sosok yang berjiwa Nasionalis karena acap kali dalam pidato-pidato Politiknnya dengan tegas akan menjalankan ekonomi kerakyatan, konsep berdikari dalam mengelola kekayaan alam bangsa yang tidak tergantung pada kapitalisme barat. Serta pembangunan karakter bangsa yang tidak malu mengakui bahwa bangsa Indonesia tidak lebih buruk dari bangsa lain.

Pada pasangan Nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno ini ada sesuatu yang menarik yakni kedua orang yang mencalonkan diri ini tidak berasal dari satu kelompok yang mempunyai peranan besar dalam perwujudan kemenangan pada kontestasi Pemilu yakni kelompok religius, meskipun demikian disinilah letak sesuatu yang menariknya, merupakan dukungan dari GNPF-MUI/Ulama yang telah bertransformasi dari gerakan menuntut keadilan terhadap Penodaan Agama, kini menjadi sebuah gerakan

Politik kaum religius Islam, yang dengan tegas mendukung seorang Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada Ijtima Ulama I dan II.

Koalisi antara Prabowo-Sandi yang nasionalis dengan GNPf-MUI/Ulama yang religus nampaknya bergitu berbeda dengan Koalisi-koalisi antara kalangan nasionalis dan religius sebelumnya, di mana tidak terdapat satu tokoh yang mewakili salah satu dari dua golongan tersebut sebagai Capres dan Cawapres. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas bahwa dukungan yang diberikan oleh GNPf-MUI/Ulama kepada Prabowo Subianto bukanlah dukungan yang bersifat kepentingan kelompok dan kekuasaan, hal ini terbukti bahwa Prabowo tidak mengambil wakilnya dari kalangan GNPf-MUI/Ulama itu sendiri melainkan seorang yang dari Partainya sendiri yakni Sandiaga Salahudin Uno.

Dukungan yang diberikan GNPf-MUI/Ulama adalah murni sebagai gerakan Politik perlawanan terhadap koalisi Petahana, yang acap kali menyerang Ulama-ulama dari GNPf-MUI/Ulama dengan kasus-kasus hukum. Gerakan Politik ini hanya memiliki tujuan untuk terciptanya keadilan hukum bagi semua dan kedaulatan NKRI, dukungan terhadap Prabowo Subianto adalah hanya sebagai sarana dan peluang untuk menciptakan hal itu berhubung hanya Prabowo Subianto yang menjadi lawan dari petahana Joko Widodo. Dukungan yang murni dan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua, itu tercermin didalam 17 pakta integritas yang diajukan GNPf-MUI/Ulama dan ditanda tangani oleh Prabowo Subianto. Inilah isi dari 17 pakta Integritas tersebut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.
4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.
10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik Pemerintah maupun swasta.
16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin keputungan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para Ulama,

aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.

17. Menghormati posisi Ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para Ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Dari 17 poin pakta Integritas yang diajukan oleh GNPf-MUI/Ulama kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno diatas, tidak satupun poin yang meminta sebuah kekuasaan Politik bagi GNPf-MUI/Ulama tersebut dengan kemenangan Prabowo-Sandi nantinya. Timbul pertanyaan bagi peneliti apa yang membuat Prabowo Subianto yakin untuk menandatangani 17 fakta integritas tersebut demi dukungan dari GNPf-MUI/Ulama, dapat kita lihat bahwa GNPf-MUI/Ulama mempunyai basis massa pendukung dengan jumlah yang besar sehingga Prabowo Subianto bersedia menandatangani 17 fakta integritas yang diajukan oleh GNPf-MUI/Ulama.

Kekuatan GNPf-MUI/Ulama dapat kita lihat dari besarnya massa pada aksi 212 tahun 2016, reuni 212 tahun 2017 dan reuni 212 tahun 2018, banyak media memberitakan bahwa massa yang hadir pada acara tersebut berjumlah jutaan orang, bahkan ada yang sampai belasan juta orang yang hadir pada acara tersebut, tentu orang yang hadir pada acara tersebut adalah

⁴ Dylan Aprialdo Rachman, *Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPf yang Diteken Prabowo-Sandiaga*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/17591881/ini-isi-17-butir-pakta-integritas-gnpf-yang-diteken-prabowo-sandiaga>. Diakses tanggal 18 Desember 2018

orang-orang yang mendukung perjuangan GNPF-MUI/Ulama, artinya kontra Petahana.

Terlepas dari berbagai pemberitaan media, panitia acara reuni 212 tahun 2018 mengklain bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah berkisar 8 juta orang yang berkumpul di wilayah Monas dan sekitarnya. Kita ambil 5 juta kepala keluarga yang mempunyai 3 orang termasuk dirinya serta mempunyai hak pilih pada Pilpres tahun 2019, maka GNPF-MUI/Ulama sudah memiliki massa berjumlah 15 juta orang yang akan memilih Prabowo Subianto pada kontestasi Pilpres tahun 2019. Setidaknya inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Prabowo Subianto menandatangani dan menyanggupi 17 fakta integritas yang diajukan oleh GNPF-MUI/Ulama demi terwujudnya dukung mendukung dalam Pilpres tahun 2019.

Pada penelitian kali ini, peneliti memilih Kota Palembang sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data hasil penelitian terkait judul yang peneliti ambil. Dengan banyak pertimbangan memilih Kota Palembang sebagai lokasi penelitian adalah bahwa mayoritas ulama yang tergabung didalam GNPF MUI/Ulama merupakan warga negara keturunan Arab, yang juga sebagian merupakan Habaib.

Kota Palembang sendiri memiliki populasi warga keturunan Arab yang cukup banyak, bahkan di Kota Palembang ada perkampungan khusus orang-orang keturunan Arab di beberapa titik di wilayah Kota Palembang. Persebaran kampung Arab tersebut antara lain adalah Kampung Arab Kuto Batu di Kelurahan Kutobatu, Kecamatan Ilir Timur 1, selanjutnya Kampung

Arab Al-Munawwar di Kelurahan 13 Ulu yang menjadi objek wisata di Kota Palembang, serta Kampung Arab di Kelurahan 9 dan 10 Ulu, 11 Ulu, 12 Ulu, 14 Ulu dan 16 Ulu yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Seberang Ulu II.⁵

Selain dari pada itu juga, Ulama-ulama yang peneliti pilih sebagai narasumber guna memperoleh data hasil penelitian terkait apa yang peneliti teliti merupakan ulama yang memang ikut langsung dalam Ijtima Ulama I dan II di Jakarta, sehingga data hasil penelitian yang diperoleh darinya merupakan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di Jakarta pada Ijtima I dan II.

Pada penelitian ini juga peneliti memilih narasumber yang berpengaruh ditengah masyarakat Kota Palembang, seperti para Habaib yang akan peneliti jadikan narasumber merupakan penggerak dan menjadi ikon dari acara tersebut yakni acara Ziarah Kubro di Kota Palembang. Acara tersebut merupakan acara yang berskala paling besar ditingkat Nasional, karena diikuti oleh ribuan Jamaah.⁶ Selain menjadi ikon acara yang di ikuti oleh ribuan jamaah tersebut, Habaib yang peneliti jadikan narsum juga menjadi ikon didalam setiap baliho kampanye Prabowo-Sandi, bahkan ada beberapa Caleg Kota Palembang yang juga memasang foto sang Habib untuk mempromosikan dirinya

⁵ Retno Purwanti, 2016, *Pola pemukiman Komunitas Arab Di Palembang*, Balai Arkeologi Palembang, Temu Ilmiah IPLBI, h. 185.

⁶ Haris Widodo, *Rangkaian Ziarah Kubro di Palembang, Ribuan Umat Ziarah di Makam Al Habib Ahmad Syech Shahab*, <http://palembang.tribunnews.com/2019/04/26/rangkaian-ziarah-kubro-di-palembang-ribuan-umat-ziarah-di-makam-al-habib-ahmad-syech-shahab>. Diakses tanggal 23 Mei 2019

Kemudian kembali kepada objek penelitian, setelah hasil Ijtima I dan II yang telah dilakukan oleh GNPF-MUI/Ulama dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh pencapresan Prabowo Subianto, juga setelah Prabowo Subianto menandatangani 17 fakta integritas yang di ajukan oleh GNPF-MUI/Ulama. Maka terjalinlah sebuah Koalisi antara kelompok nasionalis Prabowo Subianto sebagai kekuatan Politik dengan golongan religius GNPF-MUI/Ulama sebagai kelompok penekan.

Dalam berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Ulama-Ulama yang terkait dengan GNPF-MUI, para Ulama memberikan tausiah untuk tidak memilih pemimpin yang ingkar janji, ini adalah suatu bentuk kritik terhadap pihak Petahana dan simbol untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Berhubung didalam kontestasi Pilpres tahun 2019 hanya terdapat dua pasangan calon yakni Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Saindiaga Salahudin Uno, maka jelas Ulama-ulama yang terkait dengan GNPF-MUI/Ulama memberikan simbol untuk memilih pihak penantang yakni Prabowo Subianto-Saindiaga Salahudin Uno.

Maka berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik sebuah permasalahan yakni bagaimana proses terbentuknya Koalisi antara GNPF-MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto?, serta bagaimana dampak Koalisi nasionalis religius antara GNPF MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi nasionalis religius antara Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama (NU)?

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses terbentuknya Koalisi GNPf-MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto?
2. Bagaimana dampak Koalisi nasionalis religius antara GNPf MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi nasionalis religius antara Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama (NU)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya Koalisi GNPf-MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto
2. Untuk mengetahui dampak Koalisi nasionalis religius antara GNPf MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi nasionalis religius antara Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama (NU)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Referensi tambahan khasanah Ilmu Politik dan berguna sebagai referensi peneliti lain yang juga membahas mengenai Koalisi Politik.
- b. Mengembangkan pemikiran penulis sendiri tentang bagaimana Proses terbentuknya Koalisi antara GNPf-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto, Sebagai Simbolisme Koalisi Nasionalis-Religius di Indonesia serta mengetahui dampak Koalisi nasionalis religius antara

GNPF MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi nasionalis religius antara Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama (NU)

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan kontribusi literatur keilmuan dan membantu memecahkan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Partai Politik dan elite Politik

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa literatur yang menjadi acuan penulis dalam menulis penelitian ini yaitu:

Darmawan Purba dalam "*Pola Koalisi Partai Berbasis Islam (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010 – 2015)*".⁷. Darmawan Purba dalam penelitiannya menjelaskan didalam Pilkada selama ini diwarnai dengan pembentukan Koalisi dalam mengusung paslon, namun Koalisi yang terbentuk menunjukkan adanya *Mixing Ideology*, antara Partai Islam dan Nasionalis. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan fungsi Ideologi sebagai pengikat tali-tali gerakan Politik sejenis. Didalam Pilkada Lampung 2010 terdapat 9 berbasis Islam yang layak nya berkoalisi namun nyatanya tersebar pada ketiga Koalisi Paslon yang maju melalui jalur Partai Politik.

⁷ Darmawan Purba, (2012), *Pola Koalisi Partai Berbasis Islam (Studi Kasus Proses Rekrutmen Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010- 2015)*, Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui, proses Koalisi, motif dan pertimbangan Koalisi, kriteria dan mekanisme rekrutmen serta hambatan Koalisi Partai berbasis Islam,. Penelitian dilaksanakan di 9 Partai berbasis Islam, yaitu: PPP, PAN, PKS, PKB, PMB, PBR, PBB, PPNUI dan PKNU. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Koalisi yang dibangun partai-Partai berbasis Islam lebih mengedepankan Kepentingan yang sama, sehingga pola Koalisi yang terjadi cenderung pragmatis dan transaksional.

Sedangkan penulis dalam penelitian kali ini membahas tentang bagaimana terbentuknya Koalisi antara GNPF-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto, sebagai Simbolisme Koalisi Nasionalis-Religius di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa GNPF-MUI/Ulama bukanlah sebuah Partai Politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan Partai Politik tertentu, juga Dermawan Purba didalam penelitiannya tidak membahas dampak dari sebuah Koalisi terhadap Koalisi yang lain seperti penelitian yang akan penulis teliti.

Iranda Putri dalam “Analisis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Pada Koalisi Partai Nasdem, PKS dan Hanura Provinsi Lampung)”⁸. Iranda Putri didalam penelitiannya memaparkan bahwa Koalisi yang terjadi antara Partai Nasdem, PKS dan Hanura didalam mendukung Mustafa-Ahmad Jazuli Pada Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 adalah untuk memenuhi syarat minimum

⁸ Iranda Putri, (2018), *Anilis Motif Koalisi Partai Politik Dalam Menghadapu Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Pada Koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Hanura Provinsi Lampung)*, Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

jumlah kursi legislatif atau suara sah dari Partai Politik dan gabungan Partai Politik yang diajukan dalam undang-undang.

Selain dari pada itu ia juga menjelaskan bahwasannya Koalisi yang seharusnya adalah Koalisi yang bersifat Ideologis tetapi pada kenyataannya yang terjadi pada Partai Nasdem, PKS dan Hanura didalam berkoalisi hanyalah bersifat Pragmatis karena hanya mengedepankan kepentingan masing-masing Partai seperti dengan bentuk Nasdem menempatkan kadernya sebagai calon Gubernur, PKS menempatkan kadernya sebagai calon Wakil Gubernur dan Hanura mendapat kesempatan penuh untuk berkampanye meningkatkan eksistensi internal Partai juga menyalurkan program-program Partainya dalam Koalisi ini.

Jelas sekali letak perbedaannya dengan apa yang akan peneliti lakukan didalam penelitian mengenai Koalisi yang terjalin antara GNPf-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto, dimana GNPf-MUI/Ulama bukanlah Partai Politik yang mempunyai suara sah di DPR sehingga menambah jumlah kursi Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Juga calon Presiden dan Wakil Presiden yakni Prabowo dan Sandi adalah berasal dari satu Partai Partai Politik dan GNPf-MUI/Ulama bukanlah organisasi yang berafiliasi dengan Koalisi Partai Politik yang mendukung Prabowo-Sandi.

Ali Irawan dalam “Koalisi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan

Presiden Tahun 2014”.⁹ Ali Irawan didalam penelitiannya menjelaskan bahwa di tengah sistem multipartai di Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari untuk berkoalisi, landasan Koalisi berupa faktor teknis karena kurang memenuhi syarat untuk dapat mengajukan kandidat calon Presiden sendiri, Koalisi ini juga dibangun berdasarkan landasan untuk memenangkan kandidat yang akan diusungnya.

Ia mengungkapkan bahwa Koalisi ini bukanlah berlandaskan atas Ideologi, karena tidak satupun Partai Politik di Indonesia mempunyai basis Ideologi yang jelas, padahal Ideologi Partai sangat menentukan pula pilihan Koalisi mereka. Juga Ideologi menjadi pijakan Partai dalam menentukan agenda Politik strategis dalam Koalisi.

Ali Irawan menjelaskan bahwa beberapa hal, 1. Koalisi yang terjalin akibat PDI-P kekurangan perolehan suara/kursi di DPR, 2. Elektabilitas Jokowi yang merupakan calon Presiden dari PDI-P dinilai lebih tinggi ketimbang kandidat lain menjadi pertimbangan PKB untuk berkoalisi. Terlihat jelas bahwa Koalisi ini bersifat pragmatis dan sarat akan kartelisasi Politik.

Berbeda dengan Koalisi yang akan peneliti lakukan didalam penelitian mengenai Koalisi yang terjalin antara GNPF-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto, dimana GNPF-MUI/Ulama bukanlah Partai Politik yang mempunyai suara sah di DPR sehingga menambah jumlah kursi Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Juga calon presiden dan wakil presiden yakni

⁹ Ali Irawan, (2016), *Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014*. Bandung: Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Prabowo dan Sandi adalah berasal dari satu Partai Politik dan GNPf-MUI/ULAMA bukanlah organisasi yang berafiliasi dengan Koalisi Partai Politik yang mendukung Prabowo-Sandi dan tidak bertujuan untuk memperoleh kekuasaan didalam kabinet dan parlemen.

Saepul Yahya dalam "Institusi Politik dan PILKADA (Studi atas Koalisi Partai Pendukung Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangsel 2015)".¹⁰ Saepul Yahya menjelaskan didalam penelitiannya mengenai Koalisi Partai pendukung Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangsel 2015, pada Pilkada tersebut terdapat enam Partai Politik yang mendukung pasangan Airin-Benyamin, yaitu PKB, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PPP dengan ideologi yang berbeda-beda dan bukan Ideologi yang membuat Koalisi ini terjalin.

Penelitiannya menjelaskan bahwa faktor pembentuk Koalisi adalah pertimbangan pilihan rasional Partai Politik. Koalisi ini terbentuk karena adanya keuntungan materi yang didapatkan Partai. Keuntungan materi tersebut berupa uang yang didapat pada saat sebelum pemilihan dan setelah pemilihan. Keuntungan berupa uang tersebut dilakukan melalui negosiasi antara pasangan Airin-Benyamin dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing Partai pendukung pasangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut, Saipul Yahya belum sampai pada penjelasan permasalahan tentang pengaruh dari suatu Koalisi terhadap Koalisi

¹⁰ Saepul Yahya, (2016), *Institusi Politik dan PILKADA (Studi atas Koalisi Partai Pendukung Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangsel 2015)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

yang lain. Berbeda dengan apa yang akan penulis teliti yakni bagaimana pengaruh terhadap Koalisi nasionalis-religius antara GNPf-MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi nasionalis religius antara Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama.

Esty Ekawati dalam “Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.”¹¹ Ia menjelaskan bahwa sebuah keniscayaan Koalisi Politik itu terjalin didalam negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia, Koalisi menjadi sebuah keharusan karena pemilihan Umum tidak mampu menghasilkan suara mayoritas diparlemen.

Beberapa faktor menentukan bagaimana sebuah Koalisi bisa terbentuk dan dalam konteks penelitiannya faktor yang menentukan mengapa Koalisi Partai Islam sulit terwujud pada pemilihan presiden 2014, Faktor pertama yaitu Pragmatisme Politik yang membuat Partai Politik menjadi Partai kartel dimana dalam hal ini Partai menjadi agen negara dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kelangsungan hidup Partai, faktor kedua yaitu Partai Islam tidak memiliki figur populer yang mampu menyaingi popularitas Prabowo dan Jokowi.

Berbeda dengan Koalisi yang akan peneliti lakukan didalam penelitian mengenai Koalisi yang terjalin antara GNPf-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto, dimana GNPf-MUI/Ulama bukanlah Partai Politik yang mempunyai suara sah di DPR sehingga menambah jumlah kursi Koalisi pendukung Prabowo-Sandi pada pemilihan Presiden tahun 2019.

¹¹ Esty Ekawati, (2015), *Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

F. Kerangka Teori

Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang Koalisi Politik diantaranya:

Menurut Shively, mengemukakan bahwa Koalisi merupakan gabungan beberapa Partai yang memiliki tujuan sama, tujuan yang sama tersebut terlihat dari Ideologinya.¹² Menurut “Syamsudin Haris dalam Saipul Yahya”, Koalisi merupakan persekutuan dua Partai atau lebih yang didasarkan pada kepentingan Politik dan *platform* (haluan Politik) yang sama.¹³ Menurut Andrew Heywood, Koalisi adalah sebuah kelompok yang dibentuk oleh para pelaku Politik yang saling bersaing yang disatukan baik oleh persepsi bersama tentang sebuah ancaman, atau melalui sebuah pengakuan bahwa tujuan-tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah. Politik Koalisi secara alami cenderung dicirikan dengan negosiasi dan konsiliasi, sebuah usaha mencari landasan bersama, daripada pendirian dan Politik prinsip.¹⁴

Menurut Hertanto Selain Partai Politik, Koalisi dapat dilakukan oleh sesama individu, kelompok, atau antar keduanya. Ketika dibentuk, anggotanya saling bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama.¹⁵

¹² W. Philips Shively, (2015), *Power and Choice: An Introduction to Political Science*, New York: McGraw, h. 428.

¹³ Saepul Yahya, (2016), *Institusi Politik dan PILKADA (Studi atas Koalisi Partai Pendukung Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangsel 2015)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 20.

¹⁴ Andrew Heywood, (2014), *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 422-424.

¹⁵ Hertanto, et al. (2013), *Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kapala Daerah di Lampung*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 12., No. 2, h. 21

Berdasarkan beberap pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Koalisi Politik, baik itu yang dilakukan oleh Partai Politik dengan Partai Politik maupun oleh pihak diluar Partai Politik selagi tujuannya untuk kepentingan yang sama dan anggotanya bekerja sama antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama, itu semua adalah Koalisi Politik.

Menurut A. Bakri Ihsan, mengungkapkan bahwa secara garis besar Koalisi dapat dipetakan dalam dua tipe. Pertama, Koalisi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk meraih kemenangan diparlemen. Kemenangan ini menjadi penting karena Politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara diparlemen yang akan menentukan kelangsungan Pemerintahan (eksekutif). Koalisi ini sering disebut *minimum Winning Coalition*. Kedua, Koalisi yang didasarkan pada kesamaan ideologi. Walaupun kemenangan tetap menjadi target, namun Koalisi ini tetap berpijak pada kesamaan Ideologi yang dianutnya. Koalisi ini biasanya disebut *Minimum Connected Winning Coalition*.¹⁶

Menurut William B. Stevenson, membedakan dua jenis Koalisi yakni *Ad-hoc Coalition*, dan *Support Coalition*.¹⁷

1. *Adhoc Coalition*

Koalisi ini dibentuk oleh suatu kesepakatan antar Partai yang terkait suatu agenda tertentu dan umumnya tidak bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Biasanya jenis koalisi ini sangat dipengaruhi

¹⁶ A. Bakir Ihsan, (2011), *Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi dalam Sistem Quasi-Presidensial*, Jurnal Penelitian Politik, Vol.8, No.1, h. 32.

¹⁷ William B Stevenson, (1985), *The concept of "Coalition" in Organization Theory and Research*, Academy of Management Review, Vol. 10, No. 2, h. 256.

oleh perbedaan cara pandang, tingkat ketaatan pada kesepakatan koalisi serta suatu agenda terbatas yang diperjuangkan. Koalisi ini akan bertahan sejauh masih ada kesamaan pandangan dan kesepakatan di antara anggota untuk terus bersama terkait agenda yang diperjuangkan, Koalisi ini segera berakhir ketika muncul perbedaan pendapat atau kepentingan yang ingin diperjuangkan telah tercapai.

2. *Support Coalition*

Koalisi ini umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Jenis koalisi ini biasanya terkait pada beberapa agenda atau isu yang ingin diperjuangkan bersama. Jenis koalisi ini dibuat dalam suatu kesepakatan bersama sebagai haluan dari koalisi. Disamping itu koalisi ini menunjukkan intensitas komunikasi yang tinggi diantara para anggotanya. Anggota koalisi secara rutin mengadakan pertemuan demi menjaga komitmen dan ketaatan pada tujuan-tujuan koalisi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis data hasil penelitian, yang pertama teori Koalisi dari Andrew Heywood yang mengatakan Koalisi adalah sebuah kelompok yang dibentuk oleh para pelaku Politik yang saling bersaing yang disatukan baik oleh persepsi bersama tentang sebuah ancaman, atau melalui sebuah pengakuan bahwa tujuan-tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah. Dan yang kedua adalah teori dari William B. Stevenson tentang dua jenis Koalisi.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana bisa terjalin sebuah Koalisi antara GNPF-MUI/ULAMA dan Prabowo Subianto serta dampak Koalisi antara GNPF MUI/ULAMA dengan Prabowo Subianto terhadap Koalisi Joko Widodo dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁹ Latar alamiah didalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis kali ini adalah berawal dari kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat, karena dianggap tidak ada tindakan hukum yang tegas akan perbuatannya, terjadilah gelombang demonstrasi besar-besaran umat Islam yang tersinggung atas pernyataannya mengenai surat Al-maidah 51.

¹⁸ Sudjana, et al. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, h. 65

¹⁹ Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h. 5

Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian. Maka dari itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁰ Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Ulama-Ulama yang terkait dengan GNPF-MUI/Ulama di Kota Palembang, dan Ketua DPC Partai Gerindra di Kota Palembang

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan tokoh tersebut dan dokumentasi yang terkait dengan terbentuknya Koalisi antara GNPF-MUI/Ulama dengan Prabowo Subianto serta dampak Koalisi GNPF-MUI/Ulama dan Prabowo Subianto terhadap Koalisi Joko Widodo dan Nahdlatul Ulama (NU).

Data dokumentasi penulis kumpulkan dari literatur-literatur yang terkait dengan masalah-masalah tentang proses terbentuknya Koalisi antara GNPF-MUI/ULAMA dengan Prabowo Subianto serta dampak Koalisi GNPF-MUI/ULAMA dan Prabowo Subianto terhadap Koalisi

²⁰ Suharismi Arikunto, (1995), *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, h. 58.

Joko Widodo dan Nahdlatul Ulama (NU), melalui surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Analisis data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹ Empat tahap tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari beberapa informan kemudian dicatat dan dikumpulkan. Data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan mempertajam hasil dari pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

²¹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press. h. 15.

c. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas sehingga tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut.